

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di suatu negara berkembang seperti Indonesia ini penting dilakukan guna mengatasi masalah keterbelakangan seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dalam perkembangannya, pemerataan pembangunan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Itulah sebabnya ilmu ekonomi pembangunan fokus dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi di negara berkembang serta menentukan kebijakan-kebijakan dalam penyelesaian masalah tersebut.<sup>2</sup> Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya.<sup>3</sup> Selain itu, pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan perlu dilaksanakan agar tujuan utama pembangunan dapat tercapai dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk pembangunan adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh publik dalam menyediakan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Mulyaningsih, *Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: CV Kimfa Mandiri, 2019), hal. 5

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 63

secara terencana untuk membangun prasarana yang menunjang dalam terselenggaranya proses pembangunan.<sup>4</sup> Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam membangun suatu daerah. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur mempunyai fungsi sebagai sarana dalam memperlancar dan mendukung segala proses kegiatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yaitu infrastruktur jalan.

Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan utama dalam mendukung kelancaran proses distribusi barang dan mobilitas manusia pada berbagai kegiatan ekonomi. Infrastruktur jalan diperlukan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>5</sup> Sehingga peran infrastruktur jalan penting dalam suatu daerah. Selain itu, infrastruktur jalan yang baik akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat karena mempermudah kegiatan ekonomi seperti perpindahan orang dan barang dalam aktivitas produksi.

Kota Kediri adalah kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Sebagai wilayah yang merupakan salah satu pemerintahan kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri dijadikan

---

<sup>4</sup> Amsal, *Analisis Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Indocamp, 2020), hal. 10–11

<sup>5</sup> R. Pemekas, *Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman*, (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2013), hal. 52

wilayah pengembangan kawasan Lereng Wilis yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya.

**Tabel 1.1**  
**Data PDRB per Kapita Menurut Kab/Kota**  
**di Jawa Timur Tahun 2022 (Juta Rupiah)**

No	Kab/Kota	Nilai
1.	Kota Kediri	522,86
2.	Kota Surabaya	226,08
3.	Kab. Gresik	122,65
4.	Kab. Sidoarjo	115,39
5.	Kab. Pasuruan	105,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kota Kediri menjadi Kota paling kaya nomor satu di Provinsi Jawa Timur berdasarkan nilai PDRB per kapita sebesar Rp522,857juta. PDRB per kapita adalah rasio yang mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Kota Kediri merupakan pusat perusahaan rokok PT. Gudang Garam. Bahkan di tahun 2017, hampir 70% PDRB Kota Kediri berasal dari aktivitas produksi rokok Gudang Garam. Sampai saat ini, PT. Gudang Garam masih memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Kediri.<sup>6</sup> Penjualan PT. Gudang Garam mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang berakibat juga pada penurunan PDRB per kapita Kota Kediri. Untuk mengatasi penurunan nilai PDRB akibat Covid-19, maka pemerintah Kota Kediri melakukan upaya peningkatan PDRB dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Dengan peningkatan pembangunan

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kota Kediri, dalam <https://kedirikota.bps.go.id>, diakses 28 Mei 2024

infrastruktur jalan ini juga diharapkan mampu meningkatkan laju perekonomian yang nantinya akan berdampak terhadap taraf hidup masyarakat Kota Kediri.

Pada umumnya sebagian besar infrastruktur jalan di Kota Kediri sudah dalam kondisi baik. Namun secara bertahap, kualitas infrastruktur jalan akan terus ditingkatkan seiring dengan tingginya aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan secara lebih merata di seluruh wilayah Kota Kediri akan meningkatkan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan *social overhead capital* atau barang-barang modal yang menjadi dasar atau sarana penting bagi keperluan-keperluan masyarakat yang secara tidak langsung kemudian bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi.<sup>7</sup>

**Grafik 1.1**  
**Kondisi Panjang Jalan di Kota Kediri Tahun 2008-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Tahun 2008-2022.

<sup>7</sup> Mulyaningsih, *Pembangunan Ekonomi*,... hal. 164

Berdasarkan grafik 1.1 secara garis besar panjang jalan dalam kondisi baik telah terjadi peningkatan dari 67,73% atau sebesar 296,182 km pada tahun 2008 menjadi 74,56% atau sebesar 388,197 km di tahun 2019. Panjang jalan Kota Kediri dalam kondisi baik terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 213,103 km. Tetapi mulai tahun 2019 sampai 2022 panjang jalan di Kota Kediri tidak mengalami perubahan, yaitu 388,197 km. Tidak terjadinya perubahan panjang jalan selama empat tahun tersebut dipengaruhi oleh pengelolaan yang belum optimal sebagai akibat pandemi Covid-19. Meskipun proporsi jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan, tapi secara bertahap panjang jalan dengan kondisi baik harus terus ditingkatkan untuk menunjang tingginya aktivitas perekonomian masyarakat.

PT. Gudang Garam berkontribusi besar terhadap ekonomi Kota Kediri, namun semenjak pandemi Covid-19 penjualan industri PT. Gudang Garam terus menurun. Pemerintah Kota Kediri melakukan upaya untuk mendongkrak profitabilitas PT. Gudang Garam dengan cara meningkatkan pembangunan infrastuktur jalan di Kota Kediri. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan ini juga diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di sektor lain.

Dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan didukung oleh jumlah penduduk, pajak daerah, dan PDRB. Pembangunan infrastruktur jalan memerlukan partisipasi dari penduduk. Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu sebagai subjek dan

objek pembangunan.<sup>8</sup> Selain itu, untuk mendukung jalannya pembangunan infrastruktur jalan dibutuhkan sumber pendanaan yang salah satunya berasal dari pajak daerah.<sup>9</sup> Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan merupakan dua sisi kehidupan ekonomi yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi. Pembangunan infrastruktur jalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan infrastruktur jalan.<sup>10</sup> Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi peningkatan pembangunan yaitu jumlah penduduk.<sup>11</sup> Peran penduduk dalam pembangunan dapat berperan sebagai penghambat tetapi juga dapat berperan sebagai pendorong. Hal ini tergantung pada beberapa aspek yang berkaitan dengan penduduk itu sendiri. Aspek tersebut yaitu jumlah penduduk dan kualitas penduduk.

Dalam teori Nasionalis menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Ide dasarnya adalah dengan penduduk yang banyak akan berakibat pada produktifitas yang tinggi dan kekuasaan yang tinggi pula. Kaum Nasionalis beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dapat dibagi menjadi dua. Pertama,

---

<sup>8</sup> Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index di Indonesia*, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018), hal. 73

<sup>9</sup> Endi Rustendi, *Manajemen Perpajak*, (Klaten: Lakeisha, 2019), hal. 20

<sup>10</sup> Putu Ika Wahyuni, dkk., *Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2024), hal. 13

<sup>11</sup> Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), hal. 63

pertumbuhan penduduk dalam jangka pendek memang berpengaruh negatif. Kedua, dalam jangka panjang justru pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembangunan ekonomi.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran serta penduduk. Peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan penduduk yang berkualitas, sehingga tujuan pembangunan dapat mudah dicapai. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas penduduk selalu mendapat perhatian pemerintah. Penduduk yang terus bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertumbuhan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.<sup>13</sup>

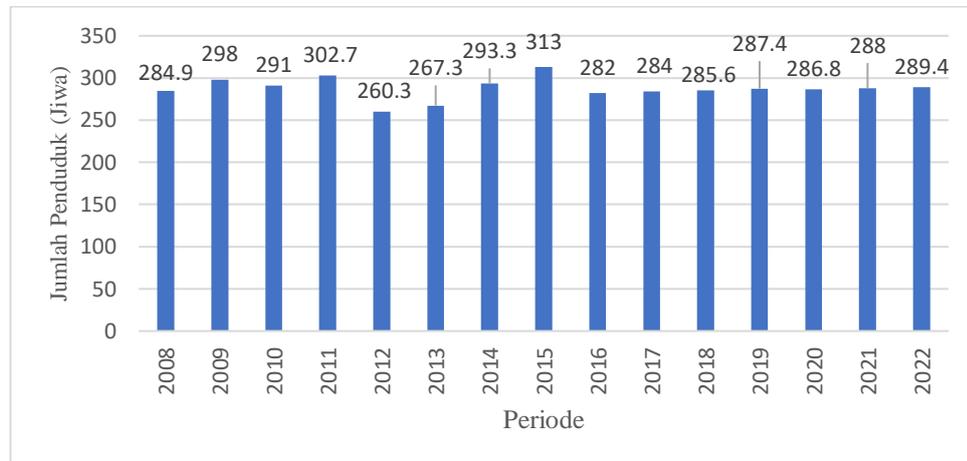
Berkaitan dengan jumlah penduduk berperan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Kediri terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>12</sup> Rahmad Budi Suharto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2021), hal. 91–92

<sup>13</sup> Nur Rahmi Hamzah, *Pengaruh Faktor-Faktor Kependudukan Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Makassar*, (Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 3

**Grafik 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kota Kediri Tahun 2008-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Tahun 2008-2022.

Berdasarkan grafik 1.2 terlihat bahwa jumlah penduduk di Kota Kediri setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jumlah penduduk Kota Kediri tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 312.999 jiwa dan jumlah penduduk terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 260.297 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk mengalami penurunan menjadi 286.800 jiwa yang sebelumnya berjumlah 287.409 jiwa pada tahun 2019. Penurunan ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingginya angka kematian.

Selain jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur jalan juga diduga dipengaruhi oleh pajak daerah. Dalam teori *development from below* yang dikemukakan oleh Davey menyatakan bahwa pajak daerah penting bagi pembangunan daerah. Manfaat pajak daerah dapat dilihat langsung oleh masyarakat di daerah tersebut.<sup>14</sup> Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah yang pemungutannya dipaksakan. Hasil pemungutan

<sup>14</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 45

pajak digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah rutin dan untuk pembangunan.<sup>15</sup>

Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap negara bahkan daerah. Karena suatu negara atau daerah harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya. Sehingga pajak digunakan untuk mengumpulkan dana supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya.<sup>16</sup> Pajak menjadi sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan infrastruktur. Meskipun pada hakikatnya pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan dari rakyat yang kemudian dikembalikan (redistribusikan) melalui pengeluaran rutin dan pembangunan yang manfaatnya untuk kepentingan seluruh rakyat.<sup>17</sup>

Dalam pemungutan pajak tidaklah mudah untuk membebankan pajak kepada masyarakat. Apabila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun jika terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena kurangnya dana yang terkumpul.<sup>18</sup> Agar pelaksanaan pemungutan pajak daerah dapat berjalan dengan baik, maka sistem pemungutan pajak daerah harus sesuai dengan persyaratan pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu perekonomian, dan sistem pemungutan pajak harus

---

<sup>15</sup> Minollah, *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), hal. 4

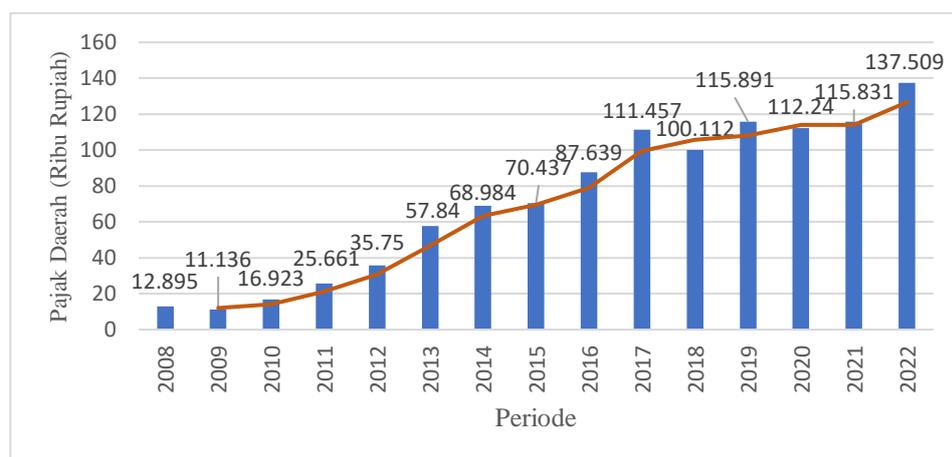
<sup>16</sup> Khalimi dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2020), hal. 2

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>18</sup> Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), hal. 39

sederhana. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak, maka dituntut kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Karena apabila penerimaan pajak terlalu rendah akan menyebabkan tidak terlaksananya pembangunan infrastruktur terutama pembangunan infrastruktur jalan.

**Grafik 1.3**  
**Pajak Daerah Kota Kediri Tahun 2008-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Tahun 2008-2022.

Berdasarkan Grafik 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, nilai pajak daerah tertinggi sebesar Rp137.509.757.025,00. Sementara, nilai pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp12.895.278.043. Nilai pajak daerah Kota Kediri pada tahun 2008 hingga tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Peningkatan pajak daerah Kota Kediri ini tidak lepas dari pengoptimalan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Kediri dan juga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun pada tahun 2020, nilai pajak daerah mengalami penurunan mencapai Rp112.240.944.288,00 dari tahun 2019 sebesar Rp115.891.296.479,41. Penurunan ini dikarenakan pergerakan ekonomi di Kota Kediri kurang stabil akibat adanya pandemi Covid-19.

Pembangunan infrastruktur jalan juga diduga dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu pertumbuhan ekonomi adalah persentase penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau persentase penambahan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan PDB.<sup>19</sup>

Menurut Todaro dan Smith menyatakan bahwa pembangunan adalah proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>20</sup> Selain itu, pendapatan PDB bermanfaat sebagai indikator standar hidup atau kesejahteraan suatu daerah dari tahun ke tahun, pembandingan kesejahteraan antar daerah, serta digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan ekonomi daerah.

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar menyatakan bahwa modal dan tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari modal dan tenaga kerja ini akan mempengaruhi meningkatkan produktivitas. Teori Harrod-Domar beranggapan pula bahwa penambahan dalam kesanggupan berproduksi ini secara sendirinya akan menciptakan

---

<sup>19</sup> Achmad Daengs GS, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*, (Surabaya: Unitomo Press, 2021), hal. 138

<sup>20</sup> Hermanto Dwiatmoko, *Peran Transportasi Perkeretaapian dalam Pembangunan Nasional Melalui Analisis Input-Output*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 16

pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Dengan demikian, pendapatan nasional akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan tercipta.<sup>21</sup>

Pendapatan PDRB per kapita bermanfaat sebagai indikator standar hidup atau kesejahteraan suatu daerah dari tahun ke tahun, menjadi pembandingan kesejahteraan antar daerah, serta digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan ekonomi daerah. Peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah yang dapat menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.<sup>22</sup>

Struktur ekonomi Kota Kediri masih tetap didominasi sektor industri pengolahan yang diprediksi akan terus berlangsung dalam beberapa tahun mendatang. Sektor industri terbesar di Kota Kediri sangat dipengaruhi oleh industri pengolahan tembakau. Selain itu, terdapat berbagai sektor industri kecil dan menengah lainnya seperti usaha yang bergerak dalam produksi makanan serta pengolahan hasil pertanian. Dari berbagai sektor industri ini menjadi sumbangan dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri.<sup>23</sup>

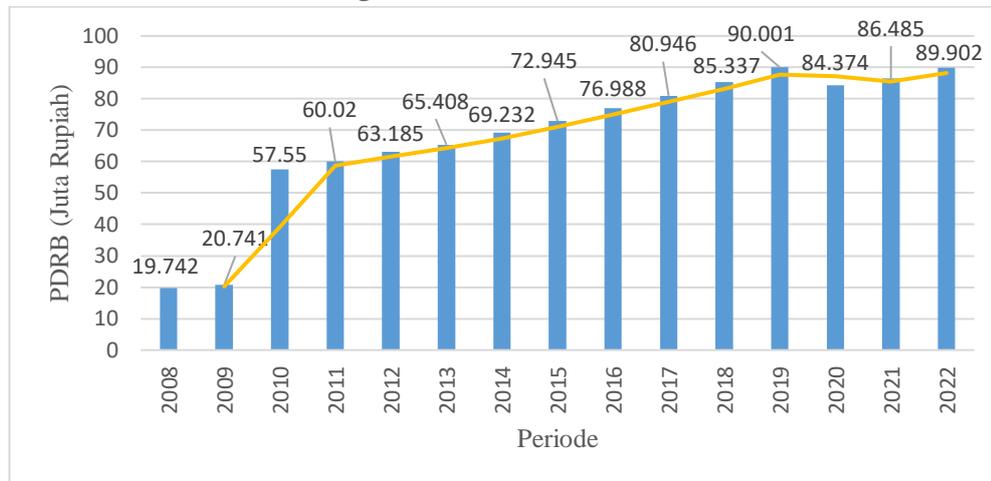
---

<sup>21</sup> Endang Mulyani, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hal. 79–80

<sup>22</sup> Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan...*, hal. 241

<sup>23</sup> Pemerintah Kota Kediri, dalam <https://diskominfo.kedirikota.go.id/>, diakses 23 Mei 2024

**Grafik 1.4**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri Tahun 2008-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Tahun 2008-2022.

Berdasarkan grafik 1.4 dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Kediri tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 90.001,5 juta rupiah. Sedangkan nilai PDRB Kota Kediri terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 19.742,6 juta rupiah. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 nilai PDRB Kota Kediri terus mengalami kenaikan. Meningkatnya nilai PDRB per kapita tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kesejahteraan masyarakat Kota Kediri semakin meningkat. Tetapi pada tahun 2020, nilai PDRB Kota Kediri mengalami penurunan menjadi sebesar 84.374,9 juta rupiah. Penurunan tersebut dikarenakan pergerakan ekonomi di Kota Kediri kurang stabil akibat adanya pandemi Covid-19.

Pembangunan infrastruktur berupa jalan dapat memberikan kemudahan akses masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur jalan yang baik akan memberikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan yang mendorong terjadinya saling interaksi, integrasi dan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur

jalan juga dapat memperluas aksesibilitas untuk memperoleh pelayanan umum administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan dan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya akan mempercepat peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik menganalisis penelitian tentang jumlah penduduk, pajak daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diduga mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri. Sehingga judul penelitian yang digunakan adalah **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Kediri Tahun 2008-2022.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sehingga penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkontrol dapat mengakibatkan pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan dari pajak daerah. Tetapi faktanya, realisasi penerimaan pajak daerah yang belum optimal sehingga belum memberikan kontribusi secara maksimal terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menurun akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri menurun. Hampir 70% PDRB Kota Kediri berasal dari aktivitas produksi PT. Gudang Garam. Hal ini membuat

pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri perlu ditingkatkan guna mendukung jalannya arus distribusi barang dan jasa. Apabila pembangunan dapat berjalan dengan lancar, maka akses masyarakat untuk menjalani kegiatan ekonomi dapat berjalan. Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, dari faktor-faktor tersebut dapat diketahui lancar atau tidaknya pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan. Apabila pembangunan sudah terealisasi dengan maksimal maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Hasil penelitian ini dilandasi pada teori yang berkaitan dengan data sekunder yang diperoleh dari data pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri tahun 2008-2022, serta penelitian terdahulu yang relevan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh secara jangka pendek terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri tahun 2008-2022?
2. Apakah pajak daerah berpengaruh secara jangka pendek terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri tahun 2008-2022?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara jangka pendek terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri tahun 2008-2022?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara jangka pendek jumlah penduduk terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri tahun 2008-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara jangka pendek pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri tahun 2008-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara jangka pendek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri tahun 2008-2022.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan kepada berbagai pihak yang terkait. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai keterkaitan dengan mata kuliah ekonomi pembangunan dan perencanaan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan akademisi dapat memahami faktor jumlah penduduk, pajak daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto yang diduga dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Penelitian ini menganalisis periode tahun 2008-2022 yang dapat menggambarkan perubahan tren dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kreativitasnya dalam memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini khususnya mengenai jumlah penduduk, pajak daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Sehingga menghasilkan penelitian yang lebih akurat serta menambah pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kota Kediri.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan satu variabel dependen yaitu Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Kediri. Pada penelitian ini menggunakan sampel

data lima belas tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2022. Diharapkan dengan sampel ini akan cukup mempresentasikan pengaruh Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Kediri.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti memberikan batasan pada penelitian ini. Batasan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh secara jangka pendek Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Kediri.
- 2) Keterbatasan data penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri.
- 3) Keterbatasan data pada penelitian ini hanya berjumlah enam puluh data dan hanya menggunakan periode lima belas tahun yaitu tahun 2008 hingga tahun 2022.

## **G. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan pembahasan yang dimaksud dari peneliti. Oleh karena itu, perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan terhadap suatu konsep secara teoritis. Definisi konseptual merupakan definisi yang berasal dari buku atau kajian literatur yang relevan dengan penelitian.

a. Pembangunan Infrastruktur Jalan (Y)

Infrastruktur sendiri merupakan fasilitas-fasilitas yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik untuk memperlancar transportasi dan menggerakkan perekonomian di suatu wilayah.<sup>24</sup>

b. Jumlah Penduduk (X1)

Penduduk sendiri merupakan sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan berbagai kondisi dan kian berkembang. Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) seiring dengan perjalanan waktu. Pertumbuhan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang yaitu angka kelahiran lebih besar dari angka kematian.<sup>25</sup>

c. Pajak Daerah (X2)

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Imma Widyawati Agustin dan Septiana Hariyani, *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*, (Malang: UD Press, 2023), hal. 7

<sup>25</sup> Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Bogor: LINDAN Bestari, 2020), hal. 5

<sup>26</sup> Minollah, *Pengantar Hukum Pajak Daerah*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2023), hal. 8

d. Produk Domestik Regional Bruto (X3)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.<sup>27</sup> PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk mengetahui sisi pendapatan regional suatu wilayah atau untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan secara riil terkait variabel penelitian dalam lingkup objek yang diteliti. Maka dapat dijelaskan seperti berikut:

a. Pembangunan Infrastruktur Jalan (Y)

Infrastruktur jalan adalah prasarana berupa jalan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Data pembangunan infrastruktur jalan dalam penelitian ini menggunakan data panjang jalan dalam bentuk tahunan yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2008 hingga tahun 2022.

b. Jumlah Penduduk (X1)

Jumlah penduduk adalah jumlah keseluruhan orang yang menempati suatu wilayah. Data jumlah penduduk dalam penelitian ini

---

<sup>27</sup> Dwi Prasetyani dan Sumardi, *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*, (Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press, 2020), hal. 2

menggunakan data jumlah penduduk dalam bentuk tahunan yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2008 hingga tahun 2022.

c. Pajak Daerah (X2)

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak bagi penduduk suatu daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tetapi digunakan untuk keperluan daerah yang akan bermanfaat juga bagi masyarakat. Data pajak daerah dalam penelitian ini menggunakan data pajak daerah dalam bentuk tahunan yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2008 hingga tahun 2022.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X3)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengetahui sisi pendapatan regional suatu wilayah atau untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Data PDRB dalam penelitian ini menggunakan data PDRB dalam bentuk tahunan yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2008 hingga tahun 2022.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir yang memberikan penjelasan secara jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas, supaya mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

## 2. Bagian Utama

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang mencakup enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab yang terdiri dari:

### Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

### Bab II : Landasan Teori

Dalam bab landasan teori ini terdiri dari: (a) landasan teori yang membahas mengenai jumlah penduduk, pajak daerah, PDRB, dan pembangunan infrastruktur jalan, (b) kajian penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, (d) hipotesis penelitian.

### Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian ini terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data dan variabel penelitian, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik analisis data.

#### Bab IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang terdiri dari pemaparan atau deskripsi data serta pengujian hipotesis yang telah disusun. .

#### Bab V : Pembahasan

Dalam bab pembahasan ini berisikan pemaparan terkait pembahasan dari hasil penelitian dengan mengkaitkan teori-teori yang ditemukan.

#### Bab VI : Penutup

Dalam akan membahas mengenai kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini merupakan bagian akhir dalam skripsi. Bagian akhir ini terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.